



Summary

Memasuki tahun keempat sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, ekonomi global dihadapkan pada tantangan baru yang tidak kalah serius. Kekhawatiran akan resesi merebak seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, meroketnya inflasi di berbagai negara, dan peningkatan suku bunga global. Padahal, sampai dengan tahun 2022 ini luka-luka pandemi belum sepenuhnya dapat disembuhkan. Faktanya, tingkat pengangguran masih relatif tinggi dan tingkat pendapatan usaha masih menurun di sejumlah sektor. Bahkan sejumlah negara masih rentan dilanda krisis pangan dan energi.

Meski demikian, patut disyukuri bagi Indonesia karena di tengah kondisi global yang cenderung rentan, kondisi ekonomi nasional cenderung stabil dan *resilient*. Tanpa mengesalkan sisa-sisa luka pandemi (*scarring effects*), di tahun 2022 ekonomi Indonesia berpeluang tumbuh 5,0–5,1%. Prediksi pertumbuhan ini merupakan revisi yang lebih optimis dibanding prediksi CORE Indonesia yang dirilis pada November tahun lalu, yakni 4–5%. Dalam pandangan CORE Indonesia, ekonomi Indonesia memiliki ciri khas dan daya tahan tersendiri, yang membedakannya dengan banyak negara lain, termasuk *peer countries*. Memang faktor eksternal, khususnya harga komoditas, berpengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan sepanjang tahun 2022. Namun, menguatnya permintaan domestik, khususnya dorongan *pent-up demand* yang sejalan dengan suksesnya pengendalian pandemi, juga tidak kalah signifikan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang menyamai dan bahkan berpotensi melampaui kondisi pra-pandemi.

Memandang ekonomi dunia tahun 2023, meskipun diprediksi tumbuh lebih lambat, CORE Indonesia sebenarnya masih melihat peluang untuk tidak serta-merta jatuh ke jurang resesi. Ekonomi negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa mungkin menjadi rentan akibat lonjakan inflasi dan pengetatan moneter. Namun Tiongkok yang menjadi mitra dagang terbesar banyak negara termasuk Indonesia menunjukkan indikasi perbaikan, sejalan dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19. Inflasi global memang masih berpotensi meningkat, namun CORE Indonesia memperkirakan tekanannya cenderung lebih rendah dibanding tahun ini.

CORE Indonesia memprediksi ekonomi nasional di tahun 2023 mampu tumbuh 4,5 hingga 5,0%. Konsumsi rumah tangga diprediksi tetap kuat dan melampaui tingkat konsumsi pra-pandemi, meskipun pertumbuhannya melambat marginal akibat tekanan global. Tingkat inflasi diprediksi lebih rendah dan tidak banyak mengganggu tingkat konsumsi secara agregat, walaupun masih akan menekan daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan kemungkinan juga masih menahan pemulihan mobilitas jarak jauh. Pengetatan moneter diprediksi lebih terbatas karena berkurangnya tekanan inflasi global dan domestik. Investasi diprediksi akan kembali menjadi penyumbang kedua terbesar pertumbuhan ekonomi 2023. Pertumbuhan investasi swasta tidak banyak terganggu oleh tekanan ekonomi global. Meski demikian, surplus perdagangan diprediksi menyempit karena pelemahan permintaan sebagian negara tujuan ekspor utama dan juga pelemahan harga komoditas khususnya komoditas non-energi.

Penasehat

Hendri Saparini, Ph.D

Penanggung Jawab

Mohammad Faisal, Ph.D

Tim Penulis

Hendri Saparini, Ph.D.

Mohammad Faisal, Ph.D.

Akhmad Akbar S., Ph.D.

Drs. Rachmat Basuki

Dr. Etikah Karyani

Muhammad Ishak Razak

Fathya Nirmala Hanoum

Eliza Mardian

Dwi Setyorini

Fitri Yana

Fani Umrotul Khikmawati

Rahmi Afzhi Wefielananda

Rafiq Azzam Al Afif

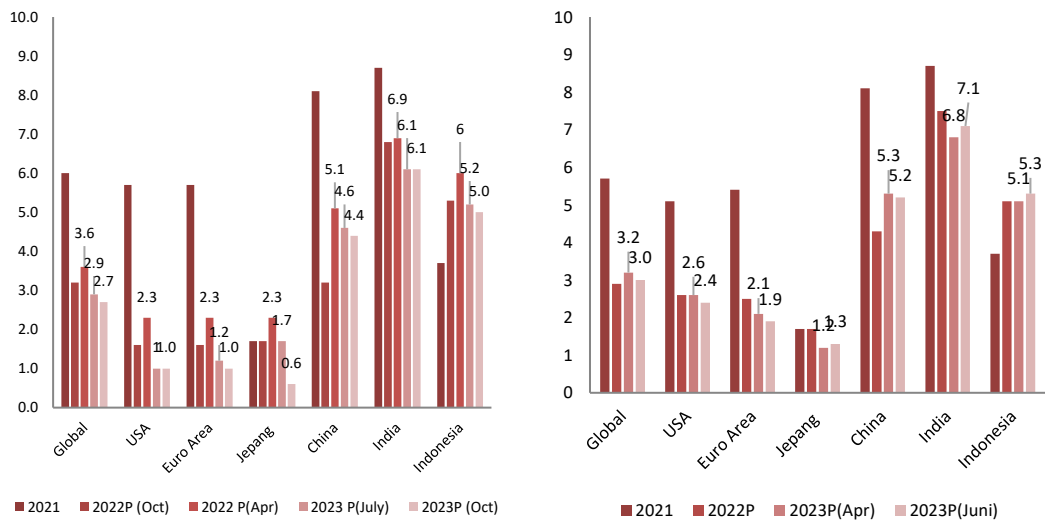
Muhamad Ferdy Firmansyah

Jakarta, November 2022

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global

Ekonomi global di tahun 2023 diprediksi tumbuh lebih lambat. IMF dan Bank Dunia pun masih cenderung terus memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Beberapa negara bahkan diprediksi menghadapi kondisi resesi.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2023



Sumber: IMF (October 2022)

Sumber: IMF (Juni 2022)

Beberapa faktor penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi global antara lain; pertama, perang Rusia dan Ukraina belum dapat diprediksi kapan akan berakhir meskipun ada kecenderungan penurunan tensi konflik. Kedua, negara utama seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa menghadapi tekanan permintaan domestik. Ketiga, pengetatan moneter yang dimulai pada Januari 2022 saat ini sudah meluas. Oleh karena itu, walaupun tekanan pada 2023 menurun, tingginya ketidakpastian masih mengiringi.

Amerika Serikat dihadapkan pada persoalan inflasi yang masih tinggi, potensi berkurangnya penciptaan lapangan kerja, dan tingginya tingkat suku bunga perbankan. Meskipun inflasi di Amerika Serikat lambat laun sudah menunjukkan penurunan, tingkat harga masih relatif tinggi. Tingkat inflasi saat ini masih di level 6% setelah sebelumnya sempat menyentuh 9%, sementara target inflasi yang ingin dicapai adalah di kisaran 2%. Oleh karenanya, the Fed diprediksi masih akan terus menaikkan suku bunga sampai target inflasi tercapai, sehingga berdampak pada perlambatan atau tidak menutup kemungkinan kontraksi ekonomi. Sementara itu, lapangan kerja yang tercipta lebih banyak disebabkan oleh kembali Bergeraknya bisnis di sektor jasa yang sempat kontraksi dalam akibat pandemi COVID-19, bukan karena adanya ekspansi bisnis atau lonjakan permintaan secara agregat.

Negara-negara Eropa masih menghadapi persoalan kurangnya pasokan energi dan kenaikan harga energi akibat perang Rusia-Ukraina. Situasi ini mengerek inflasi yang berdampak pada tertekannya konsumsi masyarakat dan stagnasi pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan Amerika Serikat dan Eropa, Tiongkok yang permintaan domestiknya mengalami perlambatan bahkan sempat berkontraksi akibat penerapan *zero covid policy* pada tahun ini, diprediksi membaik pada 2023. Meski demikian, sektor properti negeri Tirai Bambu yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Tiongkok masih menghadapi masalah yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Persoalan lainnya adalah produktivitas penduduk

yang cenderung stagnan bahkan menurun yang diperparah dengan rendahnya tingkat vaksinasi akibat keraguan masyarakat terhadap keamanan dan efikasi vaksin.

Tingginya inflasi Amerika Serikat yang mendorong The Fed mengambil langkah agresif menaikkan Federal Fund Rate (FFR) berdampak pada penguatan Dollar terhadap mata uang lainnya di dunia. Faktor ini pula yang mendorong sejumlah bank sentral negara lainnya juga melakukan pengetatan moneter untuk meredam inflasi pada tahun ini.

Pada tahun 2023, tingkat inflasi global diperkirakan relatif lebih rendah sebagai dampak pelemahan permintaan dan peningkatan suku bunga acuan di banyak negara yang dilakukan sejak tahun ini. Pelemahan permintaan global dan kekhawatiran terhadap ancaman resesi berpotensi menekan harga-harga komoditas yang pada gilirannya menekan pertumbuhan perdagangan global, penerimaan ekspor dan pendapatan pemerintah.

Ekonomi Domestik Mampu Bertahan dari Tekanan Global

Di tengah potensi perlambatan ekonomi dunia, CORE Indonesia berkeyakinan ekonomi Indonesia relatif *resilient* pada tahun depan. CORE Indonesia memprediksi ekonomi nasional di tahun 2023 berpotensi tumbuh 4,5 hingga 5,0%. Sumber utama pendorong pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang diperkirakan masih cukup kuat. Meski demikian, net ekspor yang berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022, diprediksi akan berkurang perannya di tahun depan. Sementara itu, rencana normalisasi kebijakan di tahun 2023 juga berpotensi menahan pertumbuhan belanja pemerintah.

Masih kuatnya konsumsi domestik memberikan harapan bagi dunia bisnis untuk melakukan ekspansi dan investasi. Meskipun surplus perdagangan berpotensi menyempit akibat melemahnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas, potensi peningkatan impor barang modal dan bahan baku/penolong menunjukkan bahwa aktivitas produktif di dalam negeri masih berjalan dengan baik.

Konsumsi Swasta Masih Kuat

CORE Indonesia memperkirakan konsumsi rumah tangga pada 2023 secara agregat akan melampaui level pra-pandemi, meskipun pertumbuhannya berpotensi melambat marginal secara *year on year*. Beberapa faktor penunjang konsumsi di tahun depan antara lain relatif terkendalinya pandemi, tingkat inflasi yang lebih rendah, dan dorongan belanja politik menjelang pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif. Meskipun demikian, ada pula beberapa faktor yang berpotensi menahan pertumbuhan konsumsi swasta domestik, antara lain pelemahan permintaan global serta rencana normalisasi kebijakan fiskal dan moneter di tahun depan.

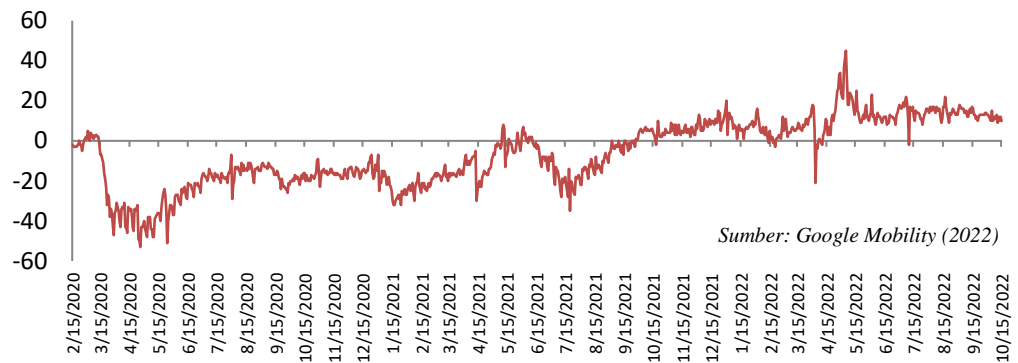
Salah satu indikator konsumsi yang tumbuh melampaui level pra-pandemi adalah mobilitas penduduk yang sudah mulai kembali normal ke level pra pandemi. Mobilitas penduduk terkait aktivitas perdagangan dan rekreasi di tahun 2022 yang telah melampaui level pra-pandemi (Gambar 2). Ini menunjukkan bahwa pergerakan untuk berwisata yang dilakukan masyarakat sudah meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun awal pandemi.

Pulihnya mobilitas masyarakat yang diiringi juga sejalan dengan peningkatan indeks penjualan riil untuk berbagai kategori barang, termasuk kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok barang budaya dan rekreasi. Demikian pula penjualan mobil yang mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Selain didorong oleh insentif pajak oleh pemerintah, peningkatan penjualan mobil juga menunjukkan meningkatnya keyakinan masyarakat golongan menengah. Meskipun demikian,

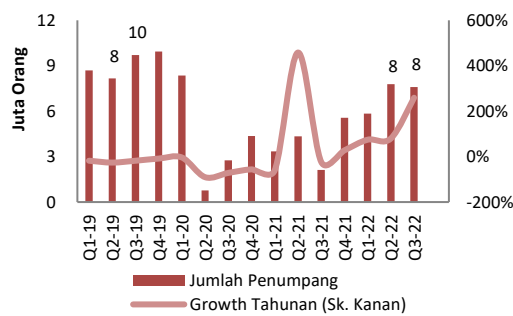
Ekonomi domestik pada 2023 berpotensi tumbuh 4,5 – 5,0%, sedikit lebih lambat dibanding 2022. Konsumsi rumah tangga diprediksi tetap kuat dan melampaui tingkat konsumsi pra-pandemi, meskipun pertumbuhannya marginal akibat tekanan global.

mobilitas jarak jauh yang dilakukan masyarakat masih belum sepenuhnya pulih ke level pra-pandemi. Hal ini terlihat melalui jumlah penumpang pesawat terbang dan kereta api yang jumlahnya masih sedikit jika dibandingkan dengan kondisi pra-pandemi (Gambar 2).

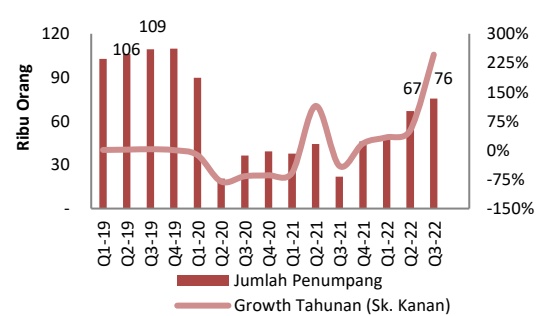
Gambar 2. Mobilitas ke Tempat Perdagangan Retail dan Rekreasi



Gambar 3. Jumlah Penumpang Pesawat Terbang



Gambar 4. Jumlah Penumpang Kereta Api



Tingkat inflasi yang diprediksi lebih rendah tahun depan tidak akan banyak mengganggu konsumsi swasta secara agregat. CORE Indonesia memprediksi inflasi tahun depan berkisar antara 2-3%, di bawah inflasi tahun ini yang diperkirakan mencapai 5-6%. Tingkat inflasi yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh pengetatan moneter yang sudah dimulai sejak triwulan keempat tahun ini, pelemahan harga komoditas khususnya komoditas non energi, dan rencana pemerintah untuk lebih mengendalikan harga barang-barang yang diatur pemerintah (*administered price*) menjelang tahun politik. Tingkat inflasi tersebut tidak akan banyak mengganggu tingkat konsumsi rumah tangga berpendapatan menengah atas yang menyumbang sebagian besar konsumsi rumah tangga secara agregat di Indonesia.

Namun demikian, daya beli 40% penduduk berpendapatan terendah tetap akan tergerus oleh inflasi. Demikian pula halnya dengan mobilitas jarak jauh yang diprediksi masih akan tertahan pemulihannya akibat tekanan inflasi. Di samping itu, lebih rendahnya inflasi tahun depan juga diprediksi mengurangi pengetatan kebijakan moneter.

Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi domestik berpotensi tertahan oleh perlambatan ekonomi global. Melemahnya permintaan pasar negara-negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa berpotensi menurunkan permintaan barang-barang ekspor dari Indonesia ke negara-negara tersebut. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya pendapatan pelaku usaha eksportir maupun tenaga kerja yang bergerak pada komoditas ekspor tersebut, yang pada gilirannya juga berpengaruh kepada daya beli kalangan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor terkait.

Tingkat inflasi diprediksi lebih rendah dan tidak banyak mengganggu tingkat konsumsi secara agregat, meskipun masih menekan daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan masih menahan pemulihan mobilitas jarak jauh.

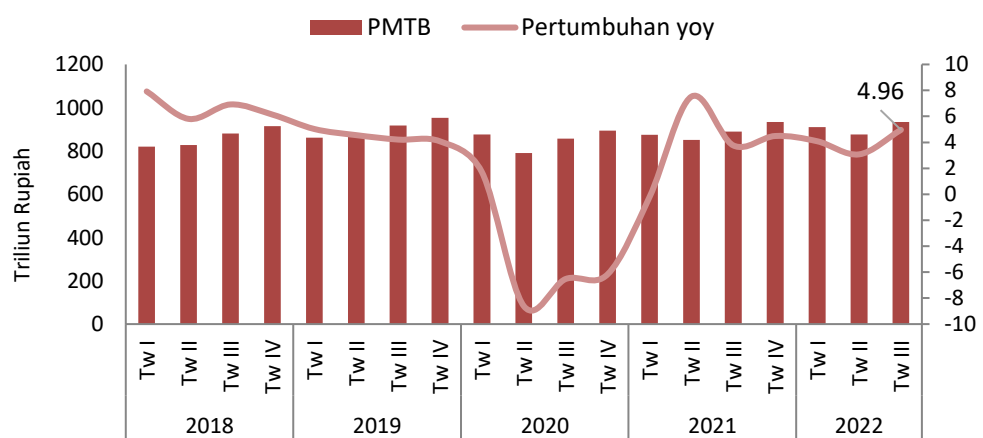
Pengetatan moneter diprediksi lebih terbatas karena berkurangnya tekanan inflasi global dan domestik.

Demikian pula halnya normalisasi kebijakan fiskal dan moneter juga berpotensi menjadi faktor penahan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun depan. Kebijakan pengembalian defisit APBN ke level di bawah 3% akan memengaruhi konsumsi melalui pengurangan stimulus yang diberikan selama pandemi, seperti penghapusan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Perumahan, serta penyesuaian tarif cukai rokok. Selanjutnya, kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan Bank Indonesia sebagai respon terhadap kenaikan suku bunga acuan The Fed pun diproyeksikan masih akan berpengaruh terhadap belanja konsumen untuk barang-barang tahan lama seperti motor, mobil, dan perumahan yang semakin banyak mengandalkan kredit perbankan.

Investasi Kembali Menjadi Sumber Pertumbuhan Terbesar Kedua

Tekanan pandemi sempat membuat kontribusi investasi terhadap ekonomi Indonesia melemah dari yang menjadi kedua terbesar setelah konsumsi swasta pada masa pra pandemi, menjadi ketiga, digantikan oleh net ekspor yang mengalami *booming* dalam dua tahun terakhir. **Pada tahun 2023, sejalan dengan melemahnya daya dorong ekspor, investasi kembali menjadi sumber pertumbuhan terbesar kedua bagi PDB nasional.** Peningkatan penanaman modal tetap bruto (PMTB) terjadi terutama pada sektor sekunder (manufaktur) dan sektor jasa. Peningkatan PMTB manufaktur terutama didorong oleh terus berkembangnya industri hilir turunan komoditas tambang seperti nikel yang digalakkan oleh pemerintah. Sementara PMTB di sektor jasa berkembang sejalan dengan semakin terkendalinya pandemi dan meningkatnya mobilitas masyarakat,

Gambar 5. Pertumbuhan PMTB Indonesia

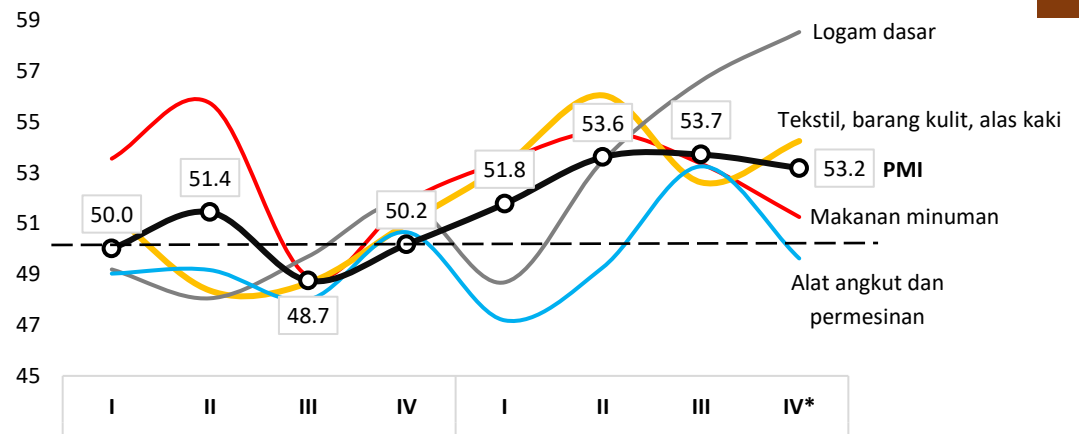


Sumber: BKPM (2022)

Permintaan domestik yang masih kuat memberikan optimisme investor untuk terus berinvestasi di Indonesia. Peningkatan investasi di sektor manufaktur, khususnya terlihat dari *Purchasing Manager Index* (PMI) Indonesia yang masih di atas 50 dan jumlah kredit investasi yang mulai meningkat kembali ke level pra-pandemi.

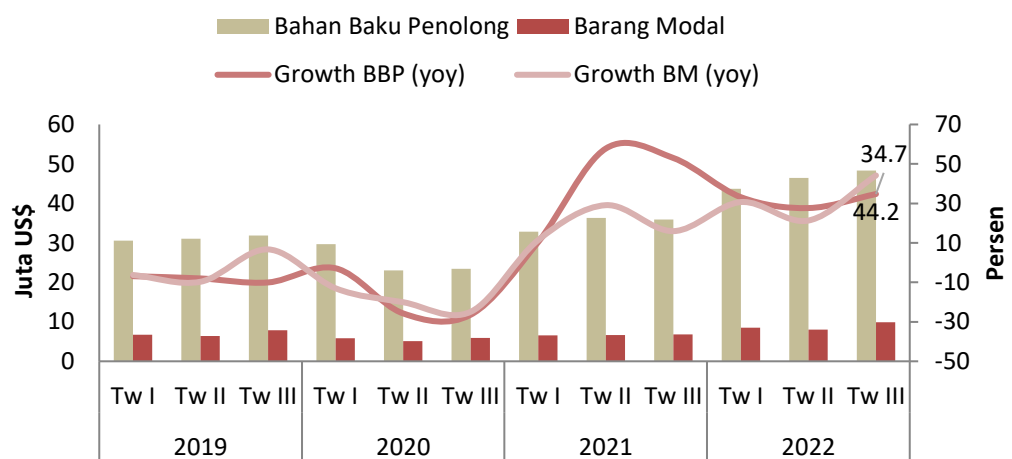
Investasi diprediksi kembali menjadi penyumbang kedua terbesar pertumbuhan ekonomi 2023. Pertumbuhan investasi tidak banyak terganggu oleh tekanan ekonomi global

Gambar 6. Purchasing Manager Index Manufaktur



Sumber: Bank Indonesia (2022)

Gambar 7. Impor Bahan Modal dan Bahan Baku/Penolong



Sumber: BPS (2022)

Faktor lain yang juga mendorong investasi di tahun depan adalah masih maraknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Anggaran infrastruktur di tahun depan juga meningkat sebesar 7,8%, meskipun rencana anggaran belanja modal berkurang sebesar 0,05% di tahun depan. Meningkatnya anggaran infrastruktur di tahun depan akan mendorong investasi ke sektor bangunan dan turunannya seperti konstruksi, listrik, air & gas, dan transportasi, gudang & komunikasi.

Sektor pertambangan yang tahun ini mengalami peningkatan investasi secara signifikan baik investasi asing maupun domestik, diproyeksikan tahun depan tetap akan menarik investor untuk berinvestasi di sektor tersebut, terutama untuk pertambangan nikel yang saat ini sudah memiliki *road map* hilirisasi yang jelas ke depannya.

Meskipun ekspansi, pertumbuhan PMTB tahun depan diprediksi melambat secara *year on year*. Faktor penghambatnya karena ketidakpastian global dan faktor domestik seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, dan kenaikan biaya produksi (bahan baku, energi, logistik, buruh). Selain itu, masih berstatus inskontitusional bersyaratnya UU Cipta Kerja juga diprediksikan akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

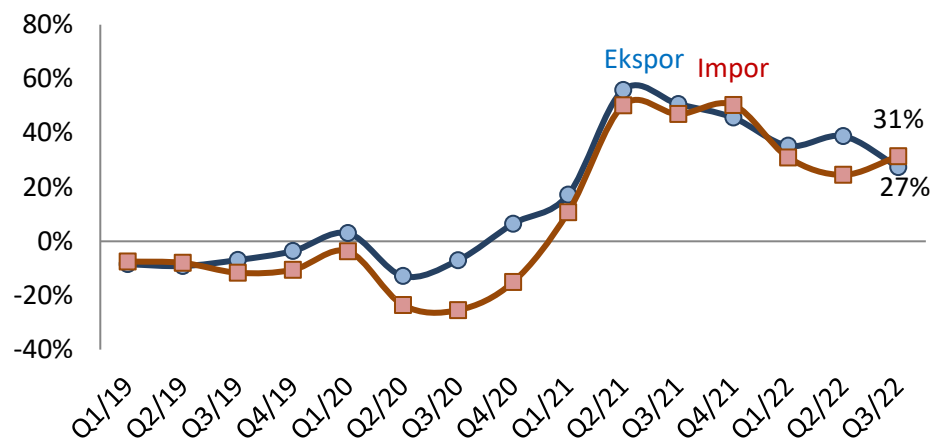
Surplus perdagangan diprediksi menyempit karena pelemahan permintaan sebagian negara tujuan ekspor utama dan harga komoditas

Surplus Perdagangan Diprediksi Menyempit

Tekanan global yang kuat di tahun depan diprediksikan akan melemahkan permintaan global, sehingga berpotensi kuat menurunkan kinerja ekspor. **CORE Indonesia memprediksikan neraca perdagangan di tahun depan mengalami penyempitan signifikan karena perlambatan ekspor, sementara impor cenderung masih kuat.** Kondisi ini berdampak terhadap melemahnya kontribusi net ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang diprediksi akan turun ke posisi ketiga setelah konsumsi rumah tangga dan PMTB.

Kinerja ekspor Indonesia sepanjang tahun 2022 cukup fantastis, meskipun ada sedikit perlambatan pada triwulan I dan III. Hal ini disebabkan adanya penurunan volume ekspor akibat larangan ekspor batubara pada Januari 2022 pada triwulan I dan terjadinya penurunan sebagian besar harga komoditas pada triwulan III, di antaranya harga minyak kelapa sawit, nikel, bijih besi dan minyak mentah. Pada triwulan II 2022 kinerja ekspor Indonesia tumbuh positif dan menguat. Hal ini didorong peningkatan volume ekspor dan peningkatan harga komoditas diantaranya batubara dan minyak mentah. Peningkatan volume ekspor ini didukung oleh meningkatnya permintaan ekspor batubara ke Benua Eropa akibat konflik Rusia-Ukraina. Peningkatan permintaan batubara tersebut terjadi akibat krisis energi, dampak dari konflik Rusia-Ukraina.

Gambar 8. Pertumbuhan Nilai Ekspor - Impor Indonesia (yoy)



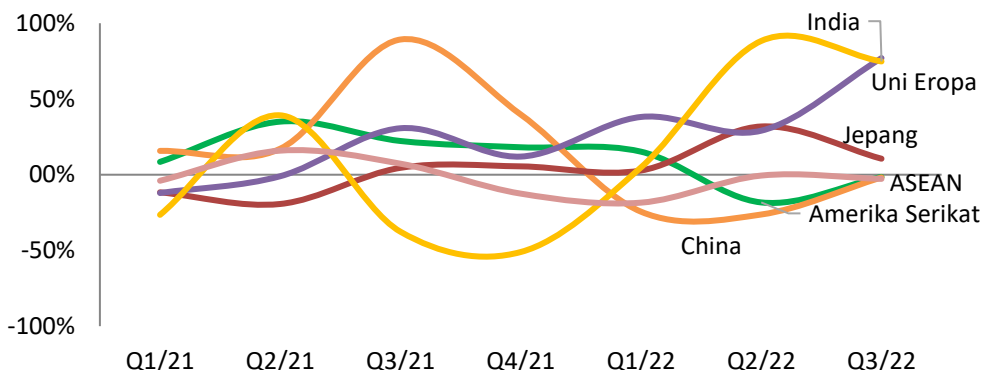
Sumber: BPS (2022)

Tren penguatan juga terjadi pada sisi impor sepanjang 2022. Pada triwulan I dan II 2022, pertumbuhan impor tumbuh melambat. Perlambatan ini disebabkan karena menurunnya volume impor barang konsumsi seperti vaksin. Program vaksinasi di tahun 2022 yang tidak segenar tahun 2021 menyebabkan penurunan kebutuhan vaksin yang mayoritas diimpor dari luar negeri. Pada triwulan III kinerja impor tumbuh menguat didorong oleh pertumbuhan nilai impor barang baku/penolong sejalan menguatnya permintaan domestik yang juga berimbas pada barang-barang manufaktur.

Surplus Perdagangan Indonesia pada 2023 diproyeksi akan menyempit secara signifikan. Penyempitan surplus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia seperti Amerika, Tiongkok dan Eropa diproyeksi mengalami akan mengalami perlambatan di triwulan IV dan tahun depan. Hal ini akan menyebabkan penurunan permintaan barang ekspor Indonesia ke negara mitra dagang. Selain itu *World Trade Organization* (WTO) juga memproyeksikan volume ekspor global pada 2023 hanya tumbuh sekitar 1 persen. Komoditas ekspor yang diprediksikan akan turun di antaranya tekstil dan alas kaki yang banyak diekspor ke negara-negara maju khususnya Amerika. Hal yang sama terjadi pada produk makanan dan minuman yang banyak diekspor ke Uni Eropa. Manakala ekspor diprediksikan turun, impor diprediksi justru tetap kuat. Permintaan domestik yang kuat dan masih geliatnya

sektor manufaktur di triwulan III tahun ini, masih memberikan harapan bagi impor bahan baku/penolong yang meningkat di triwulan IV dan tetap di tahun depan. Kondisi ini akan berdampak terhadap menyempitnya surplus perdagangan, dikarenakan ekspor yang trennya turun sedangkan tren impornya cenderung tetap.

Gambar 9. Pertumbuhan Volume Ekspor Indonesia Ke Negara Mitra (yoy)

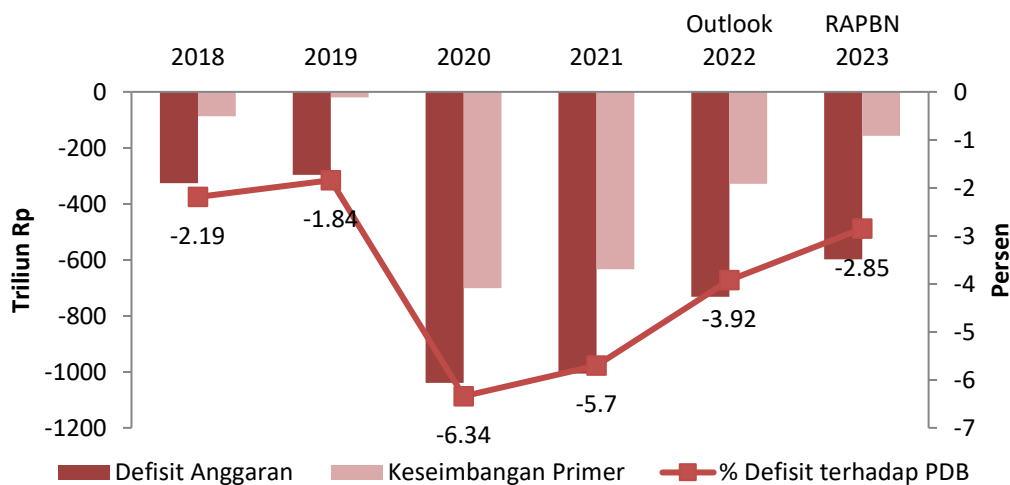


Sumber: BPS (2022)

Penyempitan Ruang Fiskal Berpotensi Menahan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada bidang sosial dan ekonomi maka belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi saat ini. Kondisi yang tidak stabil menyebabkan pemerintah menggunakan kebijakan fiskal sebagai *shock absorber* dalam mengatasi *scarring effect* yang terjadi. Insentif pajak dan usaha serta perlindungan sosial dikeluarkan, kondisi ini menyebabkan pendapatan negara dan belanja pemerintah tertekan yang berakhir pada melebarnya defisit fiskal. Tahun 2023 adalah tahun dimana defisit anggaran harus kembali dibawah 3%. Hal ini menyebabkan pemerintah berupaya untuk melakukan penurunan secara bertahap atas belanja negara maupun pencabutan atas sejumlah insentif pajak yang telah berlaku sampai akhir 2022. Oleh karena itu, CORE Indonesia mendorong untuk pemerintah dapat melakukan optimalisasi belanja negara dengan secara spesifik menyasar pihak-pihak yang masih memerlukan bantuan, melakukan intensifikasi pajak yang efisien dan efektif di 2023 serta mulai mengendalikan pembiayaan anggaran agar beban bunga yang dibayarkan pemerintah tidak semakin melebar.

Gambar 10. Ruang Ekspansi Fiskal Mengecil

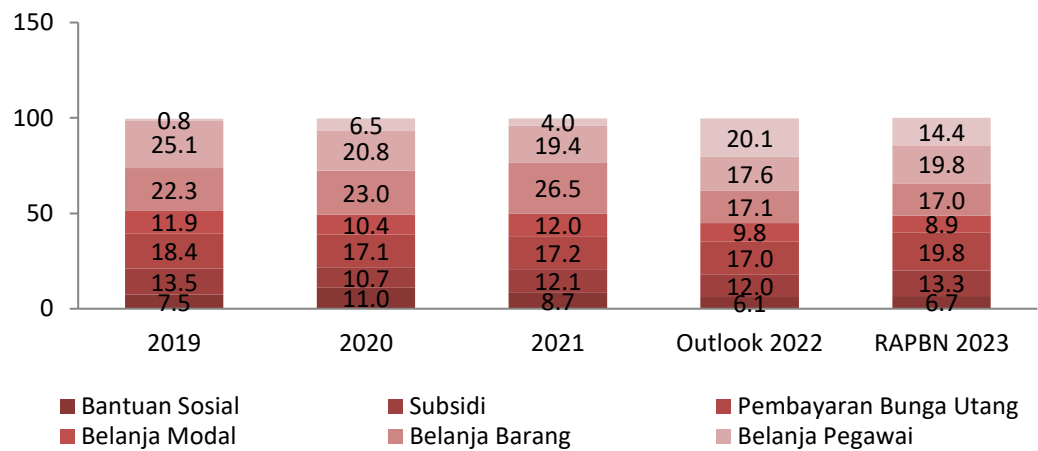


Sumber: Kementerian Keuangan (2022)

Belanja negara di 2023 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari sisi pendapatan negara ditargetkan lebih tinggi di 2023. Defisit kembali ke 3% akan memberikan pengaruh pada respon an ruang fiskal yang mengecil. Merespon hal tersebut belanja modal dan belanja barang yang dikurangi

Dengan melihat kondisi ruang fiskal yang mengecil serta ketidakpastian global maka diperkirakan di tahun 2023 konsumsi pemerintah masih akan menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini terjadi karena di 2023 merupakan tahun dimana defisit anggaran dan keseimbangan primer harus kembali pada level sebelum pandemi sesuai dengan amanat undang-undang. Amanat undang-undang untuk kembalinya defisit ke 3% akan memperkecil ruang fiskal bila dibandingkan dengan tahun 2020 sampai 2022. Namun hal ini tidak akan menjadi kendala jika pemerintah dapat mengalokasikan belanja negara pada pos yang dapat mendorong produktifitas serta mendorong belanja yang memiliki efek pengganda yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 11. Distribusi Belanja Negara 2019-2023 (Triliun Rp)



Sumber: Kementerian Keuangan (2022)

Disamping belanja negara hal yang perlu dilihat adalah upaya mengejar target pendapatan negara. Upaya pemerintah dalam mereformasi perpajakan harus terus dilanjutkan dengan strategi jangka pendek melalui intensifikasi pajak dan mempertahankan tumbuhnya sektor penyumbang pajak sektoral terbesar serta jangka panjang dengan menyasar pos penerima potensial melalui ekstensifikasi pajak. Pada APBN 2023 terdapat sejumlah anggaran yang menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu belanja barang dan belanja modal yang masing-masing menurun -7,04% dan -16,90%. Di sisi lain pos belanja tertinggi ditempati oleh pembayaran bunga utang yang naik mencapai 8,5% di APBN 2023 dibandingkan pada APBN 2022. Tingginya pembayaran bunga utang ini disebabkan oleh pesatnya penambahan stok utang pemerintah pusat dalam lima tahun terakhir utamanya saat diandalkan pada masa pandemi COVID-19. Namun hal ini perlu diwaspadai karena melebarnya proporsi belanja pemerintah yang semakin besar pada pos pembayaran bunga utang akan menyebabkan semakin kecilnya pergerakan ruang fiskal kita.

Seperti yang diperlihatkan pada gambar 12 bahwa belanja pemerintah untuk pembayaran bunga utang di 2023 mencapai porsi 19,8% terhadap total Belanja Negara, pembayaran bunga utang merupakan pos belanja terbesar setelah Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada proporsi Belanja Negara. Karena itu, jika komponen bunga utang dikeluarkan dari perhitungan, maka pertumbuhan Belanja Negara pada tahun 2023 dapat saja terjadi kontraksi. Kenaikan pembayaran bunga utang berpotensi meningkat jika bank sentral AS, The Fed, mulai menaikkan suku bunga acuan ditengah ancaman resesi ekonomi 2023. Kenaikan tersebut akan mendorong kenaikan suku bunga acuan BI, sehingga akan meningkatkan basis penetapan kupon Surat Berharga Negara (SBN). Alhasil, *cost of fund* yang akan ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal. Selain itu dengan ketidakpastian global dan ancaman resesi perubahan nilai tukar harus terus dipantau agar tidak berdampak pada melebarnya nominal utang. Maka dari itu kunci utamanya adalah pengendalian pembiayaan anggaran harus mulai diketatkan agar beban pembayaran utang pada belanja negara dapat terkendali.

Terdapat peningkatan risiko utang dan pembiayaan fiskal di 2023 dengan potensi naiknya yield obligasi pemerintah maka akan meningkatkan *cost of fund* dari pembiayaan dengan dampaknya pada potensi *capital outflow*.

Kenaikan presentase pembayaran bunga utang semakin tinggi di APBN 2023 yang mencapai 19,8% dari total belanja. Presentase pembayaran bunga utang terhadap belanja sudah terlalu besar dan berisiko yang perlu dikelola kedepannya. Selain itu pemerintah perlu memperhatikan risiko pembiayaan dari secondary market yang masih penuh ketidakpastian di 2023.

Perkembangan subsidi mengalami kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2021 di realisasi per September 2022 yaitu mencapai 72,5% sedangkan untuk bantuan sosial mengalami tekanan realisasi per September 2022 sebesar -17,9%. Di tahun 2023 untuk subsidi tumbuh tipis 0,9% sedangkan bantuan sosial tumbuh 3,2%. Walaupun harga bbm dinaikan namun tidak mengurangi anggaran subsidi energi yang dikeluarkan di 2023 yang cenderung meningkat tipis pada angka 210,7 pada APBN 2023 dari outlook 2022 yang pada angka 208.9 triliun rupiah. Permasalahan bantuan sosial perlu menjadi catatan di 2023 utamanya dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi pada tahun depan berpotensi mengulangi masalah yang terjadi pada tahun ini yaitu khususnya pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih didapati sejumlah hambatan dan masalah, seperti data ganda serta data yang belum diperbaharui sehingga mampu mencakup rumah tangga miskin dan mengeluarkan rumah tangga tidak miskin.

Di sisi lain, potensi penerimaan negara diperkirakan akan lebih tinggi pada penerimaan perpajakan namun perlu tetap waspada akibat sudah menurunnya harga komoditas, belum adanya penyesuaian tarif pajak serta perlunya intensifikasi pajak di 2023 untuk mencapai target sesuai APBN 2023. Tantangan baru yang akan dihadapi penerimaan perpajakan adalah menurunnya harga komoditas, yang kemungkinan besar akan menurunkan penerimaan perpajakan di 2023. Hal ini dapat diwaspadai bila pemerintah dapat melakukan intensifikasi perpajakan jangka pendek atau melakukan penyesuaian tarif baru di 2023. Hal ini akan mencapai target penerimaan perpajakan yang naik sebesar 4,5% di 2023. Apalagi, beberapa pasal dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan, telah memberikan ruang peningkatan penerimaan perpajakan. Namun penting diperhatikan, bahwa target wajib pajak terdaftar SPT masih terbilang kecil dibandingkan dengan wajib pajak potensial yang berpotensi meningkatkan penerimaan perpajakan.

Potensi peningkatan pajak lainnya yang bersumber dari program pengungkapan sukarela dari realisasi per September 2022 menurun -27% dibandingkan tahun 2021 hal ini karena program ini telah berakhir dan tidak memberikan sumbangsih penerimaan perpajakan di tahun 2022. Selain upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak melalui program pengungkapan sukarela yang perlu diperhatikan pemerintah adalah untuk menyusun strategi ekstensifikasi pos penerimaan potensial baru di 2023 yang menasar subjek dan objek wajib pajak baru potensial. Dalam *update* penerimaan terkait UU HPP diperlihatkan sejumlah pos penerimaan baru yang dianggap potensial cenderung masih memiliki kontribusi yang kecil pada total penerimaan perpajakan. Pos penerimaan baru yang potensial itu diantaranya adalah PPN PMSE, Pajak *Fintech* – P2P *Landing*, dan Pajak Kripto. Diperlukan strategi yang lebih matang di 2023 yang tidak hanya meningkatkan pajak dari sejumlah pos baru ini namun juga upaya menasar sasaran subjek dan objek pajak yang lebih besar dari pos lain. Sebagai contoh pos lain yaitu pajak karbon yang mungkin akan mulai efektif berlaku di 2023 yang diharapkan akan turut berkontribusi pada penerimaan perpajakan nasional.

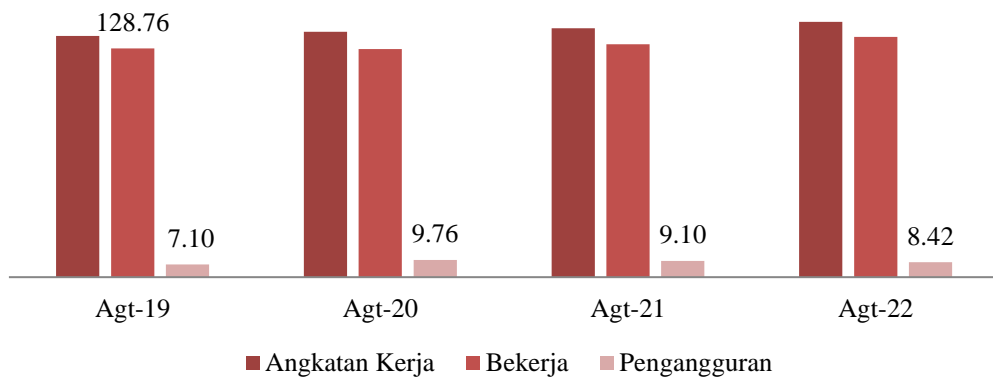
Meskipun demikian, CORE berpandangan bahwa dengan berlakunya UU HPP ini selain akan mendorong kenaikan inflasi juga berpotensi menghambat proses pemulihan ekonomi yang saat ini tengah dilakukan dan bersiap untuk ancaman resesi ekonomi di 2023. Sementara itu, program pengungkapan sukarela yang telah dilakukan harus dapat menjadi faktor pendorong kenaikan *tax ratio* dan juga potensi menaikkan *tax buoyancy* Indonesia. Sehingga keberadaan *tax amnesty* pada 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2021 dapat menjadi jembatan dalam reformasi perpajakan Indonesia. Hal ini dapat berlaku dengan catatan program-program tersebut bermanfaat untuk mendorong reformasi perpajakan dan tidak dijadikan celah untuk melakukan pengemplangan pajak dikemudian hari. Dengan demikian bila tidak ada perbaikan pada subjek dan objek pajak ini dengan dorongan *tax amnesty* dan PPS potensi *tax ratio* dan *tax buoyancy* Indonesia tidak akan mengalami perbaikan secara signifikan.

Arah reformasi perpajakan melalui intensifikasi fiskal dapat diandalkan di 2023 dengan asumsi tidak terjadi perubahan tarif dan menurunnya harga komoditas.

Gejolak PHK Berpotensi Meningkatkan Angka Pengangguran dan Kemiskinan

Angka pengangguran akan bertambah akibat badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan efek COVID-19 yang belum sepenuhnya kembali. Pengangguran pada Agustus 2022 belum kembali pada kondisi sebelum COVID-19 yakni sebanyak 8,42 juta orang atau 5,83 persen dari angkatan kerja, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki pada Agustus 2022 sebesar 83,87 persen lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan sektor, penyerapan tenaga kerja pada sektor informal Agustus 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 3 persen dari periode yang sama ditahun 2021, kondisi ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan status bekerja sendiri yakni 22,04 persen, hal ini meningkat sejak adanya pandemi COVID-19 yang dimana penduduk banyak kehilangan pekerjaan sebagai buruh atau karyawan yang dibayar sehingga beralih pada status berusaha sendiri. Sedangkan sektor formal pertumbuhannya melambat pada Agustus 2022 ini, dikarenakan adanya penurunan pekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap, dimana pada tahun 2020 terserap sebanyak 3,15% dan di tahun 2022 terserap hanya 3,04 persen.

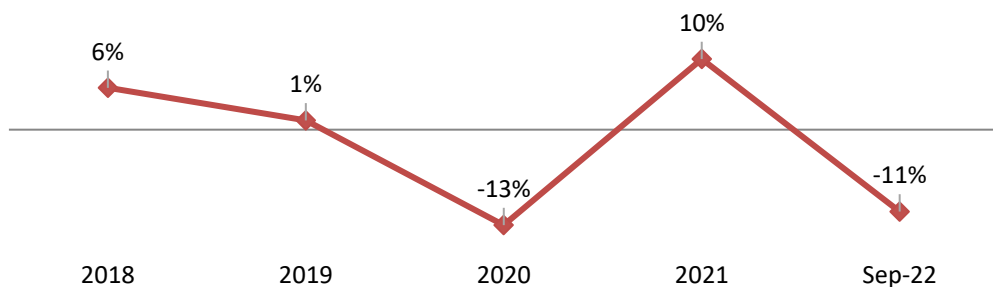
Gambar 12. Kondisi Ketenagakerjaan (Juta Jiwa)



Sumber: BPS (2022)

Tingkat pengangguran terbuka pada wilayah perkotaan Agustus 2022 sebesar 3,43 persen atau turun 0,74 persen dari Agustus 2021, hal ini karena adanya PHK diberbagai sektor industri khususnya industri garmen dan alas kaki. Dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya hilang. Hal ini terlihat bahwa masih ada 0,24 juta orang yang menganggur karena COVID-19, yang sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 0,11 juta orang, dan terdapat 3,48 juta orang yang bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorter hour) karena COVID-19 atau 0,32 juta orang yang bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19, sehingga penduduk yang terdampak pandemi COVID-19 masih ada 4,15 juta orang.

Gambar 13. Pertumbuhan Volume Ekspor Industri Tekstil dan Produk Tekstil



Sumber: BPS (2022)

Penurunan permintaan pada industri manufaktur dan strategi manajemen startup yang kurang, sehingga banyak melakukan layoff. Setahun belakangan kondisi

Angka pengangguran akan bertambah akibat badai Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dan efek pandemi yang belum sepenuhnya kembali pulih.

ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang baik, namun belum sepenuhnya kembali kepada posisi sebelum pandemi COVID-19. Pada periode akhir tahun 2022 sontak terdengar banyak industri maupun perusahaan yang melakukan PHK. Penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur mengalami perlambatan pada Agustus tahun ini, dimana melambat 2,5 persen dari pertumbuhan tahun 2021 yakni 6,9 persen, hal ini tidak lain karena kinerja ekspor industri khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) mengalami penurunan sebesar 11 persen hingga September 2022 (yoy).

Penurunan volume ekspor ini berdampak pada banyaknya karyawan yang di PHK, seperti pada industri garmen hingga awal November sebanyak 79.316 pekerja yang terkena PHK, hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan sebesar 30-50 persen di periode akhir 2022 hingga triwulan 2 tahun 2023 (jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya). Pada industri alas kaki terjadi PHK sebanyak 25.700 pekerja, disebabkan seiring penurunan permintaan sejak Juli hingga Oktober 2022 sebesar 45 persen sehingga produksi November-Desember 2022 mengalami penurunan hingga 51 persen (Asosiasi Pengusaha Indonesia, 2022).

Selanjutnya PHK pada ribuan karyawan *startup* disebabkan karena kondisi yang masih menyesuaikan kembali atau *readjustment* dari sisi valuasi market setelah pandemi COVID-19. Selain itu, PHK juga disebabkan karena adanya *overstaffing* pada startup yang menyebabkan biaya operasional membengkak, permintaan akan produknya menurun, dan strategi manajemen yang kurang stabil dalam penanggapi perubahan kondisi perekonomian

Tabel 1. Jumlah PHK Bisnis Startup di Indonesia Tahun 2022

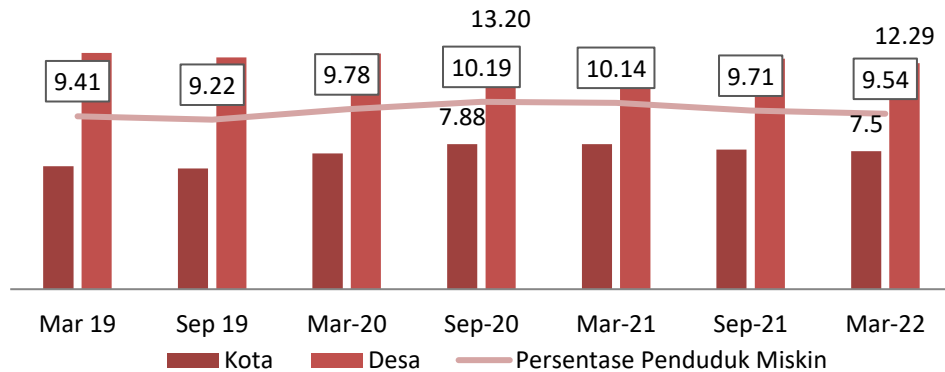
Perusahaan	Jumlah Karyawan di PHK (Orang)	Persentase dari Total Karyawan	Negara
GOTO	1300	12	Indonesia, Singapura, India, Vietnam
Shopee	187	3	Indonesia
Indosat Ooredoo Hutchinson	>300	-	Indonesia
Sicepat	360	0.6	Indonesia
Linkaja	200	33	Indonesia
Zenius	800	-	Indonesia
Mobile Premier League	100	10	Indonesia
Tokocrypto	45	20	Indonesia
Xendit	-	5	Indonesia, Filipina
Koinworks	70	8	Indonesia
Binar Academy	-	20	Indonesia
Ruang Guru	-	±50	Indonesia

Sumber: Kompilasi berbagai sumber

Kemiskinan yang belum sepenuhnya pulih akibat COVID-19, akan mendapat tekanan di awal tahun 2023. Penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen dari jumlah penduduk di Indonesia atau 26,16 juta orang, angka ini masih lebih tinggi dari angka sebelum COVID-19 yakni 9,41 persen pada Maret 2019. Namun sudah menunjukkan penurunan dari tahun 2020, hal ini juga terlihat dari angka rasio gini yang sudah mendekati angka sebelum COVID-19, serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang mulai mengecil. Penurunan persentase kemiskinan tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memberi bantalan berupa program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sebagainya.

Penurunan *demand* pada industri manufaktur dan strategi manajemen startup yang kurang menyebabkan layoff. Kemiskinan yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi akan mendapatkan tekanan di awal tahun 2023.

Gambar 14. Perkembangan Penduduk Miskin



Sumber: BPS (2022)

Efek PHK terhadap industri dan *startup* akan berdampak pada kondisi kemiskinan nantinya, dimana orang-orang akan mengalami penurunan pendapatan sehingga akan berakibat pada menurunnya daya beli, juga sebelumnya pada September 2022 pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM yang akan menambah beban masyarakat kalangan bawah, dengan ini CORE Indonesia memproyeksikan angka kemiskinan pada Maret 2023 sekitar 9,82% - 9,62%.

Program bantuan sosial untuk penganggulan pengangguran dan kemiskinan. Sejak COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah dengan sigap mengeluarkan berbagai program bantuan untuk menopang dampak dari pandemi. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 230,21 Triliun Rupiah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih hadir hingga tahun 2022. Namun ditahun 2023 pemerintah tepatnya Kementerian Keuangan tidak lagi mengalokasikan dana PEN, tetapi anggaran untuk perlindungan sosial dialokasikan secara langsung melalui belanja pemerintah pusat kepada Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Non K/L. Pada tahun 2023 ini, pemerintah mengalokasi dana sebesar 148,56 Triliun Rupiah untuk beberapa program, seperti PKH, KIP dan Prakerja yang sudah ada sejak tahun 2020, juga beberapa program yang sekiranya dapat mengurangi beban masyarakat seperti kartu sembako, subsidi listrik dan sebagainya. Ditengah kondisi perekonomian kedepannya yang diprediksi akan bergejolak, diharapkan berbagai program ini dapat menjadi bantalan untuk banyak pihak yang terkena dampak dari ketidakstabilan perekonomian pada tahun 2023.

“CORE Indonesia secara berkala baik triwulanan, tengah tahun maupun tahunan melakukan kajian tentang review dan prediksi kondisi perekonomian Indonesia ke depan serta rekomendasi kebijakan. Kajian CORE Indonesia rutin dipublikasikan dalam CORE Quarterly Review, CORE Mid Year Review dan CORE Economic Outlook”.

Kemiskinan belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga akan menjadi tekanan di awal tahun 2023.

CORE
INDONESIA
CENTER OF REFORM ON ECONOMICS

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
Jl Tebet barat Dalam Raya No. 76A, Jakarta Selatan, Indonesia 12810
T:+6221-22983998 F:+6221-22837424 Email: info@coreindonesia.org